

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL LIBRARY POLICY IN EFFORTS TO INCREASE COMMUNITY'S READING INTEREST

Revo Prambudi Adha^{1*}, Hendri Koeswara², Desna Aromatica³

¹Magister Administrasi Publik FISIP, Universitas Andalas, Indonesia

^{2,3}Administrasi Publik FISIP, Universitas Andalas, Indonesia

Koresponden email: voprambudi@gmail.com

ABSTRAK

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang masih mengalami berbagai permasalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai agen pelaksana kebijakan perpustakaan. Artikel ini bertujuan untuk melihat implementasi dan kinerja kebijakan tentang perpustakaan dalam upaya peningkatan minat baca yang dimiliki masyarakat di Kota Padang. Implementasi Kebijakan ini menggunakan acuan teoritis Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, serta dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat implementasi dan kinerja kebijakan tentang perpustakaan di Kota Padang tidak berjalan dengan baik yaitu keterbatasan SDM berkompeten di bidang perpustakaan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, Sarana serta prasarana yang dimiliki masih belum memadai akibat kurangnya APBD yang dimiliki oleh pemerintah, komunikasi dan promosi perpustakaan yang dilaksanakan kurang optimal, sikap masyarakat yang masih menganggap pendidikan belum begitu penting, serta kondisi ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 mempengaruhi fokus masyarakat sehingga menyebabkan minat baca masyarakat menjadi rendah.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, kebijakan perpustakaan, minat baca

ABSTRACT

The Library and Archives Service of Padang City is still experiencing by various problems in carrying out its duties as an implementing agent for policy on libraries. This article was aim to looking the implementing and performance of policy on libraries in attempted to increasing the public interest on reading on city of Padang. by using the theoretical reference of Policy Implementation from Van Meter - Van Horn which consisting the six variables that affect policy implementation. The data was collecting through interviews, from documentation, and observation, and analyzed qualitatively with a descriptive approach. The results was show that there are several factors that made the implementation and performance of policies on libraries in the city of Padang not run well, namely competent human resources in the field of libraries owned by Padang City Library and Archives Service were limited, facilities and infrastructure were inadequate from lacking of budget. Owned by the government, the communication and promotion of libraries that were carried out were not optimal, the attitude of the people who still considered education not so important, and the economic condition of the community due to the Covid-19 pandemic affected the community's focus, causing people's interest in reading to be low.

Keywords: Policy implementation, library policy, reading interest

PENDAHULUAN

Perpustakaan adalah tempat penyedia pengetahuan yang paling tepat untuk belajar, membaca, melakukan riset penelitian, dan juga mencari jawaban-jawaban dari setiap persoalan yang muncul, baik itu persoalan yang menyangkut pribadi manusia maupun persoalan yang berada di masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga pada hakekatnya perpustakaan memiliki fungsi sebagai sumber informasi dalam seluruh

bidang pengetahuan. Sehingga peran dari perpustakaan sendiri sangat besar dalam hal peningkatan ilmu pengetahuan serta pendidikan masyarakat.

Di bidang Pendidikan di Kota Padang, perpustakaan sendiri memiliki peranan yang sangat penting sebagai pendukung sarana masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan ilmu, pendidikan, dan informasi melalui koleksi buku

yang dimiliki perpustakaan umum Kota Padang. Selain masyarakat dapat berkunjung ke perpustakaan umum Kota Padang. oleh sebab itu Pemerintah Kota Padang membuat PERDA Kota Padang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpustakaan. Peraturan ini mengacu kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perpustakaan yang menjelaskan betapa pentingnya fungsi dari perpustakaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh setiap daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai agen pelaksana kegiatan perpustakaan di Kota Padang juga melakukan kegiatan perpustakaan keliling untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bahan bacaan dengan berkunjung ke sekolah-sekolah maupun ke tempat rekreasi. Hal ini dilakukan semata untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai penunjang dalam memberikan informasi dan pendidikan yang layak bagi masyarakat. Selain itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan inovasi berupa Rumah Pustaka-Peduli Arsip Masyarakat. Kegiatan ini berupa memberikan pinjaman buku bacaan sebanyak anggota keluarga pada setiap rumah di masing-masing kelurahan dalam waktu tertentu, apabila telah selesai maka buku tersebut akan diganti dengan buku lainnya, selain memberikan pinjaman buku dengan langsung mendatangi rumah-rumah penduduk.

Pemerintah Kota Padang, dalam upaya meningkatkan fungsi serta peran Pemerintah Kota Padang, menemukan berbagai macam masalah yang harus dihadapi. Peran serta kemampuan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, sangatlah penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan. Kapasitas dari kelembagaan yang didukung oleh tenaga atau pegawai pemerintah yang berorientasi pada tata kelola serta kinerja pemerintahan yang baik (*good governance*) sangatlah diperlukan, sehingga harapan masyarakat sesuai dengan akuntabilitas layanan publik yang diberikan.

Namun pada realitanya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dihadapkan dengan beragam masalah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Terlebih pada tata kelola perpustakaan oleh tenaga keperpustakaan dalam rangka peningkatan minat baca yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, didapatkan beberapa kelemahan pemerintah kota, terutama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam pelaksanaan dan pengimplementasian kebijakan tentang perpustakaan di Kota Padang, yang dapat dilihat dari :

1. Masih kurang memadainya fasilitas yang disediakan. Terutama rak untuk peletakan buku sehingga menyebabkan buku yang dimiliki tidak tersusun semua pada rak buku serta sebagian lainnya hanya diletakkan dalam kardus, serta kurangnya jumlah ketersediaan fasilitas kursi dan meja bagi pembaca sehingga membuat sebagian pengunjung menjadi kurang nyaman karena harus membaca sambil berdiri.
2. Sistem pengelolaan dan administrasi perpustakaan yang kurang terkelola dengan baik. Hal ini terlihat dari belum adanya ketersediaan kartu pustaka sehingga mengakibatkan buku dari perpustakaan sulit diakses pembaca.
3. Kekurangan SDM profesional yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam pengelolaan perpustakaan. Seperti kurangnya staf pegawai perpustakaan yang mengelola perpustakaan dengan baik

Suatu kebijakan dapat dilihat kemanfaatannya jika implementasi terhadap kebijakan tersebut telah dilakukan. Proses implementasi menjadi kegiatan yang cukup penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan maupun peraturan (Mulyadi, 2016). Dalam jurnal implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter-Van Horn, (Van Meter & Van Horn, 1975) implementasi kebijakan terlihat sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh 6 (enam) variabel, yaitu ukuran serta tujuan kebijakan. Ukuran serta tujuan kebijakan seharusnya dapat dilihat secara spesifik melalui peraturan yang digunakan, sehingga pada akhir dari program dapat diketahui kegagalan maupun keberhasilan dari kebijakan atau program yang dijalankan. Lalu variabel *recources*, merujuk pada besarnya dukungan sumberdaya manusia serta sumberdaya finansial, dalam pelaksanaan kebijakan maupun program sehingga dihasilkan implementasi suatu kebijakan dengan kinerja sempurna serta nilai yang efisien dapat dijelaskan.

Kemudian komunikasi antar organisasi pelaksana, dimana komunikasi yang dilakukan haruslah ditetapkan sebagai patron bagi organisasi dalam program yang dijalankan. Diperlukan koordinasi juga komunikasi dari implementor suatu program dengan lembaga terkait, sehingga adanya kerja sama serta koordinasi antara lembaga yang berperan sangat diperlukan agar tercapainya keberhasilan dari program tersebut. karakteristik dari agen pelaksana kebijakan, ialah besarnya daya dukungan dari organisasi melingkupi struktur dari birokrasi, pola hubungan serta norma yang terjadi didalam birokrasi,

dimana keseluruhan tersebut akan mempengaruhi pengimplementasian kebijakan.

Variabel selanjutnya adalah kondisi ekonomi, sosial, serta politik. Kondisi ini mencakup sumber daya ekonomi serta lingkungan yang berpotensi memberikan dukungan dari keberhasilan pengimplementasian kebijakan, dalam artian seberapa jauh lingkungan dari kebijakan tersebut akan mempengaruhi pengimplementasian kebijakan yang dilaksanakan. Terakhir, sikap dari para pelaksana program atau kebijakan, yang mencakupi tiga poin penting, pertama respon implementer terkait kebijakan, yang tentunya berpengaruh terhadap disposisi dalam pelaksanaan suatu kebijakan, kognisi atau pengetahuan terkait program yang dilaksanakan, intensitas dari disposisi implementer, merupakan preferensi dari nilai yang dimiliki oleh implementer.

Berdasarkan hal tersebut, fokus utama masalah dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah mengetahui implementasi dari kebijakan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpustakaan. Menurut Novianto (2021), evaluasi kebijakan perpustakaan diperlukan untuk mengetahui aspek apa saja yang harus dipertahankan, ditingkatkan dan apa yang perlu diubah sesuai dengan kebutuhan perpustakaan sesuai dengan keadaan yang terkini.

Penulis beranggapan bahwa pengaplikasian teori implementasi kebijakan oleh Van Meter-Van Horn dalam menganalisis kebijakan perpustakaan di Kota Padang terbilang cukup tepat, mengingat keenam faktor yang terdapat dalam teori tersebut dapat dipergunakan dalam kultur maupun budaya Pemerintahan di Kota Padang, terutama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang.

METODE

Penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan kualitatif dengan acuan pendekatan studi kasus. Menurut Dooley (Dooley, 2002) penelitian dengan penggunaan studi kasus ialah sebuah metoda relevan agar hasil penelitian dari peneliti yang relevan dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti. Penjelasan Stake didalam Denzin dan Lincoln didalam Raharjo (Raharjo, 2017), jenis-jenis dari studi kasus ialah:

1. *Intrinsic case study* atau studi kasus secara intrinsik.
2. *Instrumental case study* atau studi kasus secara instrumental.
3. *Collective case study* atau studi kasus secara kolektif.

Metode penelitian yang penulis pilih ialah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan

mempertimbangkan bahwa penulis berupaya untuk melakukan kajian, memahami, serta melakukan analisis secara mendalam tentang implementasi kebijakan perpustakaan di Kota Padang, dengan tetap menggunakan acuan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter Van Horn. Karena implementasi dari peraturan haruslah dikaji menggunakan teori yang tepat.

Penulis mempergunakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan keakuratan data yaitu dengan metoda dokumentasi serta wawancara (Moleong, 2018). Teknis wawancara dilaksanakan secara mendalam lewat diskusi maupun tanya jawab dengan berpedoman kepada pedoman wawancara, serta akan berkembang seiring dilakukannya diskusi maupun wawancara yang bersifat terbuka.

Untuk informan dari penelitian yang penulis pilih ialah aparat yang menjalankan tupoksi pengelolaan perpustakaan pada DIS-PUSIP Kota Padang. Sedangkan Metoda dokumentasi yang dilakukan peneliti berasal dari pengumpulan data lewat berkas, dokumen, buku, maupun berbagai teori yang mempunyai kaitan dengan permasalahan dari penelitian penulis. Teknis analisa dari data didalam penelitian yang penulis lakukan, berpedoman kepada analisa kualitatif data yang dijabarkan oleh Miles dan Huberman (2019). dengan berpaku pada tiga jalur analisa, yaitu pereduksian data (*data reduction*), penampilan data (*data display*), serta pengambilan kesimpulan atau proses verifikasi (*conclusion drawing*).

Kesimpulan yang didapat dari penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) diharapkan akan dapat menjawab rumusan sari masalah namun bisa jadi tidak terjawab, diakibatkan rumusan masalah didalam penelitian kualitatif yang dilakukan penulis akan bersifat sementara serta berpotensi berkembang lebih lanjut sesuai dengan perkembangan dari penelitian yang dilakukan di lapangan. Data primer dari penelitian yang penulis lakukan berupa, rekaman dari wawancara, transkripsi dari wawancara yang dilakukan, catatan temuan di lapangan, serta dokumentasi dari kegiatan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sebagai agen pelaksana kebijakan perpustakaan di Kota Padang kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya dengan baik terutama dalam meningkatkan tingkat kunjungan perpustakaan. Hayuni (2017) menjelaskan bahwa tingkat kunjungan yang rendah pada perpustakaan Kota Padang diakibatkan oleh berbagai masalah, yaitu lokasi atau penempatan perpustakaan kota

yang kurang sesuai serta diketahui oleh sedikit masyarakat, kemudian koleksi buku yang dibutuhkan pembaca masih kurang lengkap, serta kesulitan dari pengunjung dalam pencarian buku yang diinginkan, terakhir kurang memadainya fasilitas yang dimiliki oleh perpustakaan kota. Yudisman & Rahmi (2020) menjelaskan bahwa bertujuan peningkatan koleksi dan layanan perpustakaan sangat berguna untuk menentukan apa yang harus dikembangkan dan menentukan peningkatan layanan dari perpustakaan yang dimiliki.

Untuk melihat bagaimana kebijakan perpustakaan di Kota Padang dapat dikatakan efektif menurut Meutia (2017), maka peneliti melihatnya melalui variabel yang dijelaskan oleh Van Meter Van Horn dalam Teori Implementasi Kebijakan pendidikan dan pelatihan dari beberapa variabel, yakni: standar dan ukuran dari kebijakan, sumberdaya, karakteristik dari agen pelaksana kegiatan, komunikasi yang terjadi antar-organisasi, sikap dari para pelaksana kebijakan, serta kondisi lingkungan ekonomi sosial dan politik.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pengukuran keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan pertama-tama dilihat dari prosesnya dengan cara mempertanyakan pelaksanaan program, apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan, serta apakah tujuan program tersebut telah tercapai. Tidak jarang multiinterpretasi ini terjadi dalam proses mengimplementasikan suatu program, maka dari itu Van Meter Van Horn mengatakan bahwa suatu program atau kebijakan haruslah memiliki ukuran dan tujuan kebijakan yang dipaparkan secara jelas dan mudah diukur, sehingga pada akhir program dapat dilihat keberhasilan maupun kegagalan dari kebijakan atau kegiatan yang dilaksanakan. Semua itu dapat dilihat dari dokumen turunan program tersebut, seperti peraturan dan pedoman program.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpustakaan menjelaskan bahwa diperlukan keberadaan perpustakaan yang memiliki fungsi sebagai wahana pembelajaran untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat sepanjang hayat. Sehingga budaya gemar membaca perlu ditumbuhkan melalui pengembangan serta pendaya gunaan perpustakaan sebagai sumber dari informasi yang berbentuk karya tulis, cetak, maupun karya rekam.

Peraturan ini sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2007 Tentang Perpustakaan yang menjelaskan wewenang dari pemerintah daerah adalah:

- a. menetapkan aturan kebijakan daerah dalam hal mengembangkan serta monitoring perpustakaan di wilayah kerja masing-masing;
- b. pengaturan, pengawasan, dan evaluasi dari penyelenggaraan serta pengelolaan dari perpustakaan di wilayah kerja masing-masing
- c. Pelestarian dan pemberdaya gunaan naskah kuno serta melakukan alih media untuk naskah tersebut, yang dimiliki oleh warga masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

Sedangkan untuk standar kebijakan, berdasarkan peraturan tersebut untuk standar nasional dari perpustakaan sendiri terdiri atas:

- a. standar terhadap koleksi perpustakaan
- b. standar terhadap sarana dan prasarana
- c. standar terhadap pelayanan perpustakaan
- d. standar terhadap tenaga perpustakaan
- e. standar terhadap penyelenggaraan
- f. standar terhadap pengelolaan.

Standar nasional untuk perpustakaan sebagaimana yang dimaksud pada peraturan diatas dijadikan atas acuan pengelolaan, penyelenggaraan, serta pengembangan perpustakaan. Dari peraturan diatas dapat ukuran dan tujuan kebijakan yang dilaksanakan sudah jelas, yaitu mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangatlah bergantung kepada kemampuan pemanfaatan sumber daya yang disediakan. Van Meter Van Horn mengatakan bahwasanya ketersediaan sumberdaya yang memadai baik itu kualitas maupun kuantitas juga akan menentukan pencapaian tujuan kebijakan. Sumberdaya yang dimaksudkan ialah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, serta sarana prasarana yang memadai.

Sumberdaya manusia berkompeten yang dimiliki oleh DISPUSIP Kota Padang masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan, terutama untuk tenaga pengelola perpustakaan. Kurangnya tenaga pengelola ini disebabkan oleh belum adanya sertifikasi maupun keahlian yang dimiliki oleh pegawai umum di DISPUSIP Kota Padang, Oleh karena itu pengelolaan perpustakaan masih dilakukan oleh pegawai yang belum memiliki keahlian tentang perpustakaan demi pelayanan perpustakaan tetap berjalan dengan baik.

Sumber daya finansial yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam pengelollan arsip sendiri dapat dikategorikan belum memadai, hal ini diakibatkan oleh ke-

tersediaan dana APBD Kota Padang serta *reallocating* anggaran yang terjadi akibat fokus kegiatan di pemerintahan Kota Padang yang ditekankan kepada percepatan penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Kurang memadainya sumber daya finansial ini menyebabkan beberapa kegiatan terkait pengelolaan perpustakaan menjadi tidak terlaksana.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh DISPUSIP Kota Padang juga belum mencukupi. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pemerintah Kota Padang telah memiliki katalog bacaan di perpustakaan kota yang memadai. Tetapi peneliti melihat hanya terdapat dua unit mobil perpustakaan keliling yang beroperasi, sedangkan sesuai standar yang dibutuhkan oleh Kota Padang adalah 5 unit mobil perpustakaan keliling. Jumlah ini yang dibutuhkan ini sesuai dengan intensitas tugas sesuai kebijakan yaitu mencakup seluruh sekolah yang ada, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas pada Kota Padang, serta jumlah Taman Bacaan Masyarakat. Permasalahan mengenai lokasi perpustakaan kota sudah cukup strategis karena terletak di kawasan Gedung Olah Raga yang tentunya mudah diakses oleh masyarakat. Namun permasalahan yang peneliti temukan adalah promosi terhadap perpustakaan kota ini tidak berjalan dengan baik mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Komunikasi Antar Organisasi

Hasil penelitian yang penulis lakukan mengungkapkan bahwa tidak ada permasalahan serius terkait variabel komunikasi antar organisasi. Dikarenakan kebijakan ini merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh satu lembaga sebagai organisasi pelaksana. Permasalahan yang muncul hanya terdapat pada komunikasi dengan sekolah yang menyediakan layanan perpustakaan, dimana komunikasi dengan beberapa sekolah penyedia perpustakaan masih belum berjalan dengan maksimal.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik dari agen pelaksana kebijakan berkaitan dengan struktural organisasi, norma yang berlaku serta pola dari hubungan yang terjadi pada birokrasi. Karakteristik ini akan berpengaruh terhadap implementasi dari kebijakan atau program yang sudah dibuat. Karakteristik organisasi pelaksana ini juga penting dikarenakan kinerja dari implementasi juga dipengaruhi oleh kriteria yang sesuai dan cocok bagi agen pelaksana.

Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini yaitu DISPUSIP Kota Padang telah memiliki etos kerja dan telah menjalankan kebijakan telah sesuai

dengan prosedural yang dibuat. Hal ini penulis lihat berdasarkan alur kerja serta *Standard Operational Procedure* dan *Standard Operational Management* yang telah terpampang dan dilaksanakan dengan baik, namun terkadang terjadi *Human Error* yang menyebabkan prosedur yang telah disepakati tidak terlaksana dengan baik.

Sikap Para Pelaksana Kebijakan

Sikap para pelaksana kebijakan diartikan sebagai penerimaan atau penolakan pelaksana kebijakan dalam menjalankan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan diimplementasikan. Terdapat tiga unsur tanggapan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang terdiri atas respon dari implementer terkait kebijakan, kesadaran maupun pemahaman dari pelaksana terkait dengan kebijakan, serta intensitas dari disposisi implementor yaitu keberpihakan nilai yang dimiliki implementer.

Dalam Implementasi dari Kebijakan tentang Perpustakaan di Kota Padang ini terdapat berbagai macam respon pelaksana terhadap program tersebut yang peneliti temukan. Rata-rata para pelaksana kebijakan baik di level nasional, provinsi, dan kota menyambut dan menerima program ini dengan positif.

Sikap para pelaksana sudah bagus dalam melaksanakan kebijakan perpustakaan ini, namun hal ini tentunya tidak terlepas dari faktor lain yang turut mempengaruhi sikap dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan ini. Peneliti menilai bahwa sikap para pelaksana kebijakan sudah tepat mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.

Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Variabel yang juga cukup penting untuk diperhatikan guna melihat kinerja dari implementasi pemerintah berdasarkan perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter Van Horn ialah seberapa jauh kondisi lingkungan eksternal menjadi pendorong dari keberhasilan suatu kebijakan publik yang telah dibuat. Kondisi lingkungan yang kurang sesuai akan menjadi penyebab gagalnya implementasi kebijakan. Kemudian kondisi dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi tersebut seperti kondisi lingkungan sosial, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan politik.

Berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan dan dikaitkan dengan variabel Van Meter Van Horn maka diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan terkait kondisi lingkungan sosial yang terjadi pada agen pelaksana kebijakan.

Namun kondisi sosial pada masyarakat yang beragam karena taraf pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat cukup beragam menjadikan hal ini sebagai permasalahan. Cukup banyaknya masyarakat yang masih memandang pendidikan bukanlah hal penting menyebabkan implementasi kebijakan kurang berjalan dengan maksimal, sehingga juga menyebabkan minat baca di kalangan masyarakat umum menjadi cukup rendah.

Kondisi ekonomi warga terjadi penurunan, diakibatkan oleh pandemi Covid-19, ikut menjadi penyebab dari rendahnya minat baca masyarakat. Masyarakat dengan kelas ekonomi menengah kebawah masih belum menganggap perpustakaan itu penting, dan lebih berfokus kepada peningkatan taraf ekonomi dibandingkan dengan hal sekunder seperti membaca. Walaupun perpustakaan berbasis digital sudah dapat diakses dengan mudah menggunakan telepon selular, tapi pada kenyataannya hanya diakses oleh segelintir masyarakat yang membutuhkan.

Kondisi politik yang terjadi pada Pemerintahan Kota Padang juga turut menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan ini. Tingginya tingkat mutasi pegawai yang terjadi di pemerintahan Kota Padang menyebabkan kebijakan ini kurang berjalan dengan baik. Seharusnya pemerintah Kota Padang lebih melihat dengan teliti terkait permasalahan ini sebelum mengambil pilihan dalam perstrukturan pemerintahan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan penulis pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa implementasi dan kinerja kebijakan perpustakaan di Kota Padang dalam meningkatkan minat baca masyarakat masih belum berjalan dengan optimal. Pembagian tugas kerja serta bidang kerja dari pegawai yang belum sesuai dengan keahlian yang dimiliki juga menimbulkan problematika terkait implementasi kebijakan ini. Anggaran yang dimiliki oleh agen pelaksana kegiatan masih jauh dari kata memadai mengingat beban kerja dan fungsi dari agen pelaksana dalam menjalankan kebijakan juga menjadi permasalahan baru.

Keterbatasan anggaran yang dimiliki ini juga berdampak pada sarana serta prasarana yang masih belum sesuai standar. Sedangkan permasalahan lain yang terjadi terletak pada faktor internal dan eksternal baik dari DISPUSIP Kota Padang sebagai agen pelaksana kebijakan serta masyarakat sendiri. Latar belakang pendidikan dari masyarakat Kota Padang serta efek dari pandemi

Covid-19 menyebabkan minat baca dari masyarakat menurun, walaupun pemerintah sudah berusaha payah dalam mengimplementasikan kebijakan ini dengan segala keterbatasan yang ada, namun respon dari masyarakat yang kurang menerima dan menganggap perpustakaan serta pendidikan itu penting menjadi masalah utama dalam pelaksanaan kebijakan.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang terkait data beserta informasi yang telah diberikan kepada penulis, yang mana sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Qorni Novianto. (2021). Kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan: Formulasi, implementasi, hingga evaluasi. *Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, 13(2), 46.
- Deddy Mulyadi. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. In *Alfabeta* (Rev. 2). Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Matthew B. Miles, A. M. H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UI Press.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*.
- Raharjo, M. (2017). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. 13–14.
- Rahimah Hayuni, N. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kunjungan di perpustakaan. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 6(1), 141–146.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Cetakan 26). Alfabeta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Yudisman, S. N., & Rahmi, L. (2020). Kebijakan Pengembangan Koleksi Di Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta. *UNILIB : Jurnal Perpustakaan*, 11(2), 108–117.